



Kebijakan Pendidikan pada Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I Pascakemerdekaan, 1953-1955

Offy Resdiantari,^{1*} Zulkarnain¹

¹Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri
Yogyakarta, Indonesia

Email: offyresdiantari.2024@student.uny.ac.id, zulkarnain@uny.ac.id

^{*}Korespondensi

Article History: Received: 21-05-2025, Revised: 25-08-2025, Accepted: 26-08-2025, Published: 30-09-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membahas tentang kebijakan pendidikan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955), termasuk dampaknya terhadap bangsa Indonesia pascakemerdekaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian historis yang meliputi tahap pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan paradigma dekolonisasi pendidikan. Periodisasi pada penelitian ini dibatasi dari tahun 1953 hingga 1955 guna menganalisis lebih dalam berkaitan kebijakan pendidikan yang diterapkan pada masa berlangsungnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Adapun hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa kebijakan-kebijakan pendidikan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I berhasil merealisasikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950. Hal tersebut direpresentasikan oleh aksi Yamin sebagai Menteri PP dan K yang melanjutkan dan mengembangkan Rentjana Peladjaran Terurai (1952) sebagai kurikulum pendidikan yang mendekolonisasi pengaruh pendidikan kolonial pada masa Kabinet Ali. Yamin juga mendukung adanya ekstensifikasi pendidikan yang direpresentasikan dengan adanya subsidi dari pemerintah untuk sekolah-sekolah tingkat sekolah dasar, menengah, dan kejuruan, termasuk bagi sekolah swasta. Selain itu, dibukanya perguruan-perguruan tinggi pada tahun 1954 yang menaungi berbagai disiplin ilmu juga ikut memberi dampak pada iklim pendidikan Indonesia yang menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

Kata Kunci:

kabinet Ali Sastroamidjojo; kebijakan pendidikan; pascakemerdekaan

Abstract

This research aims to discuss education policies during the Ali Sastroamidjojo I Cabinet (1953-1955), including their impact on the Indonesian nation after independence. The research method used is the historical research method which includes the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The approach used in this paper uses the decolonization paradigm in the field of knowledge. The periodization in this study is limited from 1953 to 1955 in order to analyze more deeply the education policies implemented during the Ali Sastroamidjojo I Cabinet. The results of this study found that education policies during the Ali Sastroamidjojo I Cabinet succeeded in realizing Law Number 4 of 1950. This is represented by Yamin's actions as Minister of PP and K who continued and developed the Rentjana Peladjaran Terurai (1952) as the education curriculum during the Ali Cabinet. Yamin also supports additional assistance from the government for elementary, secondary, and vocational schools, including private schools. In addition, the opening of universities in 1954 that covered various disciplines also had an impact on Indonesia's educational climate, which became better than before.

Keywords:

after independence; ali sastroamidjojo's cabinet; education policy



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Apabila melihat ke belakang, bangsa Indonesia yang baru merdeka memerlukan sebuah sistem yang dapat mendidik dan mengarahkan bangsa Indonesia ke arah kemajuan peradaban. Seperti yang disebutkan oleh Nailufar (2015) bahwa pendidikan juga berupaya meng-enskulturasi atau pembudayaan masyarakat yang bertujuan untuk membentuk peradaban yang lebih adiluhung. Sehingga nasib keterasingan bangsa Indonesia dapat berubah setelah lama dikolonisasi oleh Barat dan tidak lagi menjadi bangsa tertindas yang termotivasi dalam mengimitasi, mengikuti, dan menyerupai bangsa yang mengkolonisasi (Freire, 2008).

Pascapendudukan Jepang, bangsa Indonesia mengalami euforia revolusi kemerdekaan di tahun 1945. Pada masa itu, euforia yang terjadi di masyarakat menyulut emosi yang beragam, seperti kebahagiaan, semangat revolusi, dan kebebasan dari kolonialisme-imperialisme Belanda dan Jepang. Namun, emosi positif tersebut dilampiaskan sebagian masyarakat dengan tindakan yang negatif dengan melakukan kerusakan fasilitas dan balas dendam terhadap orang-orang yang menjadi dedengkot pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia. Ricklefs (2007) menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi sebab banyak area perkebunan dan sarana industri yang rusak di banyak wilayah Indonesia sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kedatangan Belanda dan sekutu di tanah Indonesia pada bulan September 1945 menambah babak perjuangan baru bangsa Indonesia.

Sementara itu, di samping adanya konsentrasi melawan Belanda dalam perang kemerdekaan, pemerintah Indonesia yang baru lahir juga langsung menyoroti sektor pendidikan. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengeluarkan Maklumat 22 Desember 1945 (Anwar, 2017). Maklumat yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun II Nomor 4 dan 5 halaman 20 kolom 1 tersebut menyebutkan bahwa “dalam memajukan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya diusahakan agar pengajaran di langgar, surau, masjid, dan madrasah terus dan ditingkatkan”. Pemerintah tetap menginginkan sektor pendidikan untuk terus berjalan tanpa memandang tempat, meskipun kondisi internal Indonesia masih bergejolak pasca menyerahnya Jepang kepada sekutu dan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Konstruksi peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah telah terserap sejak pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah Nusantara sejak abad ke-19. Sama seperti yang dilakukan oleh Spanyol di Filipina. Masyarakat Filipina awalnya memiliki peradaban yang progresif dan maju hingga berhasil mengontrol rute perdagangan dan terlibat dalam pembuatan kapal serta industri lainnya. Namun, kedatangan kolonialitas Spanyol merobohkan tatanan tersebut melalui pengimplementasian kebijakan kolonialnya sehingga membuat bangsa Filipina menjadi bangsa yang terjajah (Alatas et al., 2023).

Sebagai bangsa yang terjajah, pola pemikiran merdeka yang sekaligus dapat mengembangkan peradaban telah terkekang oleh tonggak kolonialitas bangsa Eropa. Hal ini lambat laun mengakibatkan adanya gesekan antara budaya lokal dengan

budaya kolonial yang secara laten berupaya menggerus eksistensi masyarakat ulayat melalui pengetahuan kolonial yang berdampak pada perubahan kultural. Seperti yang disebutkan oleh Werner Kraus dan Vogelsang (2012) dalam Carey & Noor (2022) bahwa kolonialitas membawa perubahan tingkah laku dan gaya berpakaian masyarakat lokal karena hal tersebut membawa simbol-simbol laten dalam tatanan masyarakat. Seorang lokal berdarah biru yang dekat dengan Belanda dan mengenyam pendidikan serta menggunakan seragam kolonial, maka akan dipandang setara dengan orang-orang Belanda. Sementara itu, bagi para bangsawan yang tidak dekat dengan Belanda dan enggan memakai seragam, maka akan dipandang lebih rendah daripada kawan sejawatnya.

Melalui kekuatan pemerintah kemerdekaan Indonesia, para pionir revolusi terus berupaya mendekolonisasikan bidang pengetahuan. Misalnya yang dilakukan oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama selama kurang lebih empat bulan dari Agustus - November 1945. Silitonga (2021) menyebutkan bahwa posisi Ki Hadjar sebagai menteri pendidikan memang tidak lama, tetapi perjuangannya dilanjutkan dalam Panitia Penyelidik Pengajaran sebagai ketua. Bersama dengan tokoh-tokoh pendidikan lain, Ki Hadjar Dewantara mencurahkan pemikiran untuk merumuskan landasan pendidikan Indonesia dengan mereduksi pengaruh pengetahuan kolonial dan membentuk pengetahuan lokal yang berbasis pada nasionalisme dan persatuan. Upaya Ki Hadjar Dewantara ini kemudian dilanjutkan dan dikembangkan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Selama masa perumusan dasar pendidikan pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda kembali ke tanah Indonesia dan kembali berupaya menancapkan tiang kolonialitasnya. Sejak kedatangannya pada bulan Oktober 1945, Belanda bersama sekutu mencegat usaha pemerintah Indonesia yang baru berdiri. Peperangan terjadi di banyak daerah secara sporadis dari tahun 1945. Namun, perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda pasca proklamasi kemerdekaan dapat diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 2 November 1949. KMB menghasilkan perjanjian yang membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berafiliasi dengan Uni Indonesia-Belanda.

Hasil KMB memang memberikan bangsa Indonesia perdamaian sementara dan membentuk sebuah negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) atau *Republic of United States of Indonesia* (RUSI). Namun, hasil KMB memunculkan krisis politik yang menyebabkan perseteruan di berbagai daerah karena terdapat dualisme pandangan antara bentuk negara federal dan kesatuan (Poesponegoro, 2011). Terlebih lagi, salah satu hasil konferensi tersebut merugikan negara Indonesia karena membebankan utang pemerintah Hindia Belanda pada pemerintah Indonesia sejumlah 6,1 miliar gulden atau sekitar 1,73 miliar dolar AS (Wardaya, 2008). Dengan jumlah utang yang dibebankan Belanda pada pemerintah Indonesia yang baru lahir, tentunya hal tersebut menjadi persoalan yang problematik yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Sedemikian rupa kondisi pada masa demokrasi parlementer di Indonesia.

Pada era demokrasi parlementer, jabatan perdana menteri diawali oleh kepemimpinan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri yang memimpin kabinetnya dari bulan September 1950 hingga Maret 1951. Natsir hanya menjabat selama satu tahun dan dilanjutkan oleh Sukiman pada April 1951 hingga April 1952. Sementara itu, jabatan perdana menteri ketiga diambil alih oleh Wilopo bersama

kabinetnya dari bulan April 1952 hingga Juni 1953. Tiga masa pemerintahan kabinet tersebut tidak hanya mengurus persoalan politik dan keamanan yang saat itu sedang bergejolak, tetapi juga tetap menyoroti bidang pendidikan. Suradi (1986) menyebutkan bahwa hal ini ditandai dengan adanya Kementerian Pengadjaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (PP dan K) yang memperluas upaya mencerdaskan masyarakat sehingga dapat menaikkan derajat bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang menjadi Menteri PP dan K di setiap masa pemerintahan tiga kabinet tersebut, antara lain Dr. Bahder Djohan (kabinet Natsir), Wongsonegoro (kabinet Sukiman), dan digantikan kembali oleh Dr. Bahder Djohan (kabinet Wilopo).

Memasuki masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo yang dimulai pada Juli 1953, Ali Sastroamidjojo mengangkat Yamin sebagai Menteri PP dan K untuk mengatur sektor pendidikan Indonesia yang sudah disusun sedemikian rupa oleh para tokoh sebelumnya. Sama seperti tiga kabinet sebelumnya, kabinet yang didirikan Ali Sastroamidjojo berupaya mengelola banyak sektor untuk memperkuat eksistensi internal dan eksternal Indonesia. Hal tersebut menjadi respons bangsa Indonesia pasca kekuatan politiknya berhasil didapatkan lebih lanjut melalui KMB di akhir tahun 1949. Pembentukan dan pembentukan kebijakan baru di sektor pendidikan menjadi upaya yang krusial dalam membangun sebuah bangsa yang baru merdeka. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk ditelusuri lebih lanjut karena proses dekolonisasi dalam bidang pendidikan semakin gencar dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Akan tetapi, wacana yang membahas mengenai bidang pendidikan pada masa Ali Sastroamidjojo I belum dipandang sebagai topik pembahasan yang memiliki urgensi untuk diselami lebih dalam. Pembahasan yang sering diangkat oleh para peneliti berputar pada dinamika politik dan pemerintahan yang terdapat di dalam internal dan eksternal Indonesia, seperti sistem pemerintahan dan ketatanegaraan demokrasi liberal, persiapan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung pada April 1955. Seperti hasil penelitian yang disajikan oleh Ketut Sedana Arta (2020) yang membahas tentang sistem pemerintahan demokrasi parlementer dan pemilihan umum pertama tahun 1955, Samson Ganda J. Silitonga (2021) yang membahas tentang sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia, dan Setiawan, et al., (2018) tentang sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa demokrasi liberal.

Selain itu, penelitian yang ditulis oleh Rizaldi, et al., (2023) mengenai dampak keluarnya NU dari Masyumi terhadap politik Indonesia pada tahun 1952-1960 dan Farabi Fakhri (2017) tentang strategi korupsi yang mulai tumbuh di kalangan elite-elite baru negara pada tahun 1950-1957 juga ikut memberi tampilan akademis mengenai wacana perpolitikan pada masa Ali Sastroamidjojo. Penelitian lain yang berkaitan dengan periode Ali Sastroamidjojo I dapat ditemukan dalam tulisan (Ewing, 2019) yang membahas tentang hubungan internasional pascakolonial dan iklim geopolitik internasional yang diikuti oleh negara-negara Asia dan Afrika dalam agenda Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengangkat wacana pendidikan pada masa Ali Sastroamidjojo I dengan tujuan mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan di masa kabinet Ali Sastroamidjojo tahun 1953-1955 yang secara tidak langsung berpengaruh pada pembentukan peradaban bangsa Indonesia sebagai bangsa yang baru merdeka sehingga didapatkan benang merah yang linier dengan peristiwa-peristiwa selanjutnya, termasuk secara laten yang terjadi di masa sekarang.

Urgensi penelitian ini terletak pada kurangnya perhatian akademik terhadap sejarah Indonesia pada masa kepemimpinan Ali Sastroamidjojo I di tahun 1953-1955, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan dampaknya pada masyarakat. Selain itu, periode tersebut juga bertepatan dengan masa-masa awal konsolidasi politik dan pembangunan nasional pascakolonial yang menentukan arah kebijakan pendidikan Indonesia di masa selanjutnya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian historis yang berupaya merekonstruksikan peristiwa yang terjadi di masa lalu melalui beberapa tahapan. Menurut Kuntowijoyo (2013), penelitian historis memiliki empat tahapan, antara lain 1) pemilihan topik, 2) heuristik, 3) kritik, 4) interpretasi, dan 5) historiografi. Kelima tahapan tersebut perlu dilakukan dalam penelitian sejarah karena berkorelasi satu sama lainnya dalam merekonstruksi suatu peristiwa di masa lalu.

Tahap awal, yakni pemilihan topik dilakukan atas dasar kedekatan emosional dimiliki oleh peneliti sebagai satu dari sekian juta bangsa Indonesia yang hidup dan mendapat pendidikan di abad ke-21 mendorong peneliti untuk menelusuri bagaimana kebijakan pendidikan di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia dapat memberi dampak pada bangsa Indonesia. Selanjutnya tahap heuristik, pada tahap heuristik, peneliti mengumpulkan sumber berupa surat kabar, arsip, buku, jurnal, dan dokumen maupun literatur lainnya yang relevan dengan kebijakan-kebijakan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Sumber primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah surat kabar dan arsip dokumen pemerintah. Adapun surat kabar tersebut, antara lain *Java Bode*, *Der Waarheid*, *Indische Courant*, *Het Nieuwsblad voor Sumatra*, dan *De Preangerbode*. Sementara itu, arsip dokumen pemerintah yang digunakan sebagai sumber primer adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1947 tentang Memusatkan Segala Urusan Sekolah-Sekolah Lanjutan Negeri Pada Kementerian Pengajaran Pendidikan Dan Kebudayaan.

Mengingat beberapa sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber literatur Belanda, maka peneliti menggunakan dua aplikasi transliterasi untuk menerjemahkan informasi yang terdapat dalam surat kabar tersebut. Dua aplikasi yang digunakan untuk mentransliterasikan informasi yang terkandung dalam surat kabar tersebut adalah *Google Translate* dan *iTranslate*. Melalui dua aplikasi tersebut, peneliti mentransliterasikan informasi yang terdapat dalam sumber primer dari bahasa Belanda ke bahasa Inggris dan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam informasi yang tertera dalam surat kabar tersebut sehingga proses heuristik dapat berjalan dengan lebih optimal.

Selanjutnya, pada tahap kritik atau verifikasi sumber dilakukan uji otentisitas, kredibilitas, dan validitas dokumen dan literatur yang dijadikan sebagai sumber referensi. Tahapan ini memengaruhi hasil penelitian karena otentisitas dan kredibilitas sumber dinilai dalam tahap ini sehingga keaslian dan kebenaran sumber berkorelasi secara inheren dengan fakta (kebenaran). Masih dengan menggunakan dua aplikasi transliterasi sebelumnya, hasil terjemahan yang diperoleh kemudian direkap dalam bentuk catatan-catatan penting. Berdasarkan rekapan tersebut, peneliti berusaha mengelaborasi dan mengkomparasikan informasi-informasi

yang terkandung dalam sumber primer dan sekunder sehingga sumber yang diperoleh telah teruji otentisitas, kredibilitas, dan validitasnya.

Setelah melakukan kritik atau verifikasi sumber, tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Peneliti menginterpretasi atau menafsirkan data dan informasi yang telah didapatkan dengan meminimalisir analisis yang subjektif supaya tidak memunculkan tendensiusitas atau bias dalam memahami informasi yang didapatkan. Kemudian yang terakhir adalah tahap historiografi. Peneliti menyusun hasil interpretasi dari data dan informasi yang telah didapatkan ke dalam tulisan yang disusun secara sistematis dan kronologis menjadi sebuah rekonstruksi sejarah.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pendidikan Pascakemerdekaan hingga Awal Demokrasi Parlementer

Pergerakan militer Belanda yang terjadi pasca perang dunia 2 di Indonesia mengakibatkan ibu kota Indonesia dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada Januari 1946. Pemindahan ibu kota ini juga memunculkan kausalitas lain yang mengakibatkan terhambatnya proses kerja pemerintahan yang baru berdiri. Kantor-kantor kementerian dan pemerintahan yang awalnya beroperasi di Jakarta dipindahkan ke daerah lain. Seperti kantor Kementerian Pengajaran yang berubah nama menjadi Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (PP dan K) dipindah dari Jakarta ke Surakarta pada tahun 1946. Selanjutnya, ketika agresi militer pertama terjadi di pertengahan tahun 1947, Kementerian PP dan K yang kala itu dipimpin Ali Sastroamidjojo sebagai menterinya mengungsi ke daerah Madiun sampai proses penyerahan kedaulatan selesai (Suradi, 1986).

Walaupun pada masa itu Indonesia sedang digempur dengan kekuatan Belanda dan sekutu pasca perang, pemerintah Indonesia yang baru lahir telah menginisiasi penyusunan dan pembentukan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) didirikan sebagai wadah pendidikan tinggi bagi masyarakat. Pada awalnya, BPTRI terdiri dari empat fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Farmasi. Namun, terdapat saran dari Panitia Penyelidik Pengajaran supaya BPTRI dibagi menjadi lima fakultas, antara lain Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ekonomi (Suradi, 1986).

Konfrontasi militer Belanda di Indonesia juga mengakibatkan pemindahan kantor operasional beberapa fakultas dari perguruan tinggi di Jakarta. Beberapa fakultas yang dipindahkan ke daerah lain, antara lain Fakultas Kedokteran dipindahkan ke Klaten, Fakultas Pertanian dipindahkan ke Solo, dan Fakultas Teknik dipindahkan ke Yogyakarta. Adapun sebagian Fakultas Hukum dan Kedokteran masih berada di Jakarta (Suradi, *et al.*, 1986: 21). M. Said dalam Suradi (1986) menyebutkan bahwa kegiatan pendidikan di Indonesia baru berhenti ketika agresi militer kedua dilancarkan Belanda pada akhir tahun 1948.

Meskipun mengalami gejolak perubahan cepat yang masif, pemerintah pada masa-masa awal kemerdekaan tetap memerhatikan bidang pendidikan secara aktif sebagai dimensi fundamental sebuah bangsa. Terlebih lagi, banyak masyarakat mulai mengenyam sekolah di lembaga pendidikan dasar sejak Suwandi menetapkan kurikulum pendidikan Rentjana Peladjaran pada tahun 1947. Kurikulum tersebut merombak pendidikan kolonial dan menjadi awal munculnya pendidikan nasional yang dibentuk secara struktural dan sistematis karena eksistensinya didukung oleh afirmasi keberadaan pemerintah Indonesia yang baru berdiri. Dengan adanya

kurikulum pendidikan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, maka persoalan yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ketersediaan guru sebagai penggerak utama pendidikan.

Roda pendidikan harus terus diupayakan untuk terus berjalan menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk meneruskan nasib bangsa. Meskipun Indonesia telah memiliki banyak tokoh yang beprofesi sebagai insinyur di bidang teknik dan dokter di bidang kesehatan hingga guru dan birokrat yang menangani administrasi publik, orang-orang tersebut merupakan lulusan sekolah-sekolah Belanda. Lebih lanjut, sekolah-sekolah bentukan Belanda memiliki substansi pendidikan yang kala itu erat kaitannya dengan iklim politik kolonial Belanda (Madinier, 2017). Hal tersebut menjadi alasan disusunnya pendidikan baru yang berbasis ke-Indonesia-an dan mendekolonisasikan pengaruh Belanda di Indonesia.

Berbicara mengenai pendidikan guru pada masa kolonial, sebenarnya telah terdapat sekolah keguruan yang menghasilkan lulusan seorang guru atau pendidik. Namun, kualitas lulusan sekolah keguruan pada masa kolonial dibagi menjadi beberapa hierarki berdasarkan muatan pelajaran yang diadakan di sekolah. Beberapa di antaranya adalah lulusan Guru Sekolah Desa, lulusan Kursus Guru Bantu, lulusan *Normaalschool*, dan lulusan *Kweekschool*. Adapun upah atau gaji guru-guru tersebut ditetapkan dalam keputusan *Department van Onderwijs en Eredienst*. Guru lulusan *Kweekschool* digaji lebih tinggi sekitar f. 75-150 per bulan, guru lulusan *Normaalschool* digaji lebih rendah sekitar f. 30-45 per bulan, guru lulusan Kursus Guru Bantu digaji sekitar f. 20-30 per bulan, dan lulusan Guru Sekolah Desa digaji sekitar f. 15-25 per bulannya (Prayogo, 2024).

Perbedaan upah guru ini didasarkan pada kemampuan bahasa Belanda dan kemampuan pedagogik yang dimiliki oleh lulusan sekolah-sekolah guru tersebut. Dapat diketahui bahwa lulusan *Kweekschool* digaji lebih tinggi dari lulusan sekolah lainnya karena *Kweekschool* terafiliasi erat dengan pemerintah kolonial Belanda sehingga kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan Belanda. Namun, diseminasi ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat lokal dibatasi oleh Belanda dan hanya beberapa wacana saja yang berseliweran di bidang pendidikan. Kondisi tersebut disebutkan oleh Syed Hussein Alatas (1972) dalam Alatas (2024) sebagai *captive mind* (pemikiran yang terkekang) karena cara berpikir orang-orang ulayat didominasi oleh pemikiran Barat sehingga para ulayat hanya mengimitasi dan tidak mengedepankan sikap yang kritis.

Pemerintahan baru yang didaulat oleh bangsa Indonesia menginginkan adanya perubahan untuk melepas pengaruh kolonial. Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk sebuah lembaga Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) yang dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara yang menjabat sebagai Menteri PP dan K pertama. Langkah awal yang dilakukan Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri PP dan K berupaya melakukan dekolonisasi ilmu pengetahuan yang sentral operasinya berada di sekolah-sekolah lembaga pendidikan. Ki Hadjar Dewantara mengeluarkan arahan untuk mereduksi dan memudahkan bentuk pendidikan kolonial supaya diganti dengan bentuk pendidikan yang lebih sarat dengan materi pengetahuan umum, pendidikan budi pekerti, serta semangat nasionalisme (Silitonga, 2021).

Selang beberapa waktu, bentuk satuan pendidikan disusun ulang dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Panitia Penyelidik Pengajaran mengusulkan penyesuaian lama belajar dari Sekolah Rakjat (SR) selama 6 tahun dan

pendidikan menengah berupa Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Tinggi yang masing-masing dikenyam selama 3 tahun. Selain itu ada juga Sekolah Kedjuruan dengan lama belajar 3-6 tahun yang dapat dimasuki pasca Sekolah Rakjat. Selepas menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, siswa dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan tinggi dalam Sekolah Tinggi selama 4-6 tahun. Adapun Sekolah Kedjuruan biasanya ditujukan bagi anak-anak yang ingin bekerja setelah rampung pendidikan dasar sehingga muatan Sekolah Kedjuruan diisi oleh muatan keterampilan untuk mengasah kemampuan praktik siswa.

Adapun muatan utama yang diberlakukan dalam kurikulum pendidikan tahun 1946-1947 di tingkat dasar atau Sekolah Rakjat adalah pelajaran tentang baca, tulis, dan menghitung. Di samping itu, terdapat mata pelajaran lain, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, seni lukis, jasmani, dan lainnya. Sementara itu, pada tingkat Sekolah Menengah, terdapat beberapa mata pelajaran yang diajarkan pada siswa, antara lain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ilmu eksak, ilmu alam, ilmu kehidupan, ilmu bumi, sejarah, seni lukis, jasmani, budi pekerti, dan pekerjaan wanita (Utami, et al., 2024).

Kebijakan Pendidikan di Masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955)

Demokrasi parlementer Sebelum terjadinya perubahan politik yang cepat pada masa demokrasi parlementer, Hatta sempat memberlakukan Maklumat Nomor X tanggal 3 November 1945. Noer (1991) menyebutkan bahwa maklumat tersebut memberikan anjuran pada masyarakat untuk mendirikan partai politik sebagai wadah perjuangan menuju pembebasan nasional. Diharapkan dengan adanya partai politik yang banyak terbentuk dapat memengaruhi arah berpikir rakyat yang sebagian besar memiliki keterbatasan pendidikan. Namun, apabila terdapat anjuran pembentukan partai politik pada masyarakat berarti akan menimbulkan adanya sistem politik yang multipartai (Setiawan, et al., 2018). Masing-masing partai memiliki kepengurusannya sendiri sehingga struktur kepemimpinannya dapat memengaruhi mekanisme perjuangan politik Indonesia.

Dampak dari sistem politik yang multipartai terjadi ketika Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer. Terdapat pandangan dari Karim (1983) yang mengatakan bahwa anjuran pembentukan partai politik yang tertera dalam maklumat tersebut malah berdampak pada pemerintahan yang tidak terarah atau dapat dikatakan mengalami kerancuan. Ihwal pembentukan kabinet juga akan memunculkan tantangan dalam membentuk tatanan kabinet yang tepat. Hal ini ditegaskan oleh Natsir ketika hendak menjabat sebagai perdana menteri sekaligus pemimpin kabinet pada September 1950. Natsir mengatakan dalam *Het Nieuwsblad voor Sumatra* Jilid 3 Nomor 641 yang terbit pada 24 Agustus 1950 bahwa kesulitan-kesulitan yang sebelumnya telah diantisipasi dalam pembentukan kabinet pada akhirnya terjadi. Selain itu, permasalahan selanjutnya adalah tidak adanya kekuatan mayoritas suara di parlemen dapat mengakibatkan kabinet yang telah ditetapkan rentan kolaps jika ada oposisi yang mengajukan mosi tidak percaya pada kabinet.

Seperti yang terjadi pada pertengahan tahun 1954. Surat kabar *Java Bode* jilid 103 Nomor 69 yang terbit pada 30 Oktober 1954 menyebutkan bahwa sejumlah pihak di parlemen, yakni Partai Masyumi dan Liga Muslimin menunjukkan sikap oposisinya terhadap kabinet Ali. Gejolak konflik internal yang terjadi di berbagai daerah mulai menggoyahkan pemerintahan kabinet Ali karena belum terbentuknya pemerintahan yang kuat. Namun, kabinet Ali Sastroamidjojo dapat dikatakan

sebagai kabinet yang memimpin pemerintahan paling lama daripada kabinet-kabinet lainnya. Ali menjadi perdana menteri sekaligus pemimpin kabinet selama dua tahun dari Agustus 1953 hingga Agustus 1955.

Sama seperti kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet Ali Sastroamidjojo mengawali pemerintahannya dengan menetapkan program kerja kabinet dan berkoordinasi dengan para menterinya. Ali Sastroamidjojo mengangkat Mohammad Yamin sebagai Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (PP dan K) Indonesia. Yamin sebagai Menteri PP dan K berupaya merealisasikan pendidikan bangsa Indonesia yang lebih berkembang dan menyelaraskan zaman sehingga dapat bersaing dalam taraf internasional pada tahun 1954. Sreoeckarno juga berpandangan bahwa Indonesia pada masa itu memerlukan adanya generasi intelektual atau tenaga ahli yang dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia di seluruh dimensi ilmu pengetahuan (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya). Hal ini mengindikasikan bahwa di samping persoalan politik yang merebak dari dalam maupun luar negeri, pemerintah Indonesia berupaya membangun basis pendidikan yang lebih baik.

Upaya membangun basis pendidikan nasional Indonesia pasca kemerdekaan belum usai, meskipun pembahasan tentang dasar dan tujuan pendidikan Indonesia telah dimulai beberapa hari pasca proklamasi. Pemerintah Indonesia perlu meninjau banyak hal berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan yang ada di masyarakat dan mengolahnya menjadi suatu kebijakan pendidikan yang menjadi pondasi pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, diperlukan pembentukan kurikulum pendidikan sebagai pedoman yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Syafaruddin dan Mesiono (2012) menjelaskan bahwa definisi kurikulum adalah susunan rencana dan pengaturan yang mencakup materi pelajaran serta metode yang digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya kurikulum, maka seluruh komponen penyelenggara pendidikan dapat berjalan dengan sistematis dan terarah menuju tujuan pendidikan.

Kondisi kurikulum pendidikan Indonesia pada masa demokrasi parlementer dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan kondisi perpolitikan Indonesia yang masih dalam fase pencarian bentuk yang sesuai. Penyelenggaraan pendidikan resmi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950. Sementara itu, konstitusi turunan yang mengatur tentang pendidikan Indonesia pada masa demokrasi parlementer tertuang dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan (UUPP) atau dikenal juga dengan Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 1950 tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran serta organisasi sekolah.

Adanya UU Nomor 4 tahun 1950 tidak lepas dari adanya agenda Permusyawaratan Pendidikan yang digelar di Solo pada 1947 (Suradi, 1986). Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh pendidikan tersebut membahas tentang dasar penyelenggaraan pendidikan dan solusi atas masalah pendidikan yang sedang dihadapi. Hasil yang didapatkan dari pertemuan Permusyawaratan Pendidikan di Solo dikolaborasikan dengan hasil Panitia Penyelidik Pengajaran dan menghasilkan UU Nomor 4 tahun 1950. Undang-undang tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di kemudian hari, seperti pemberlakuan kurikulum pendidikan Rentjana Peladjaran Terurai pada tahun 1952.

Kurikulum Rentjana Peladjaran Terurai disahkan oleh Dr. Bahder Djohan pada masa kabinet Wilopo tahun 1952. Bahder Djohan merupakan Menteri

Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Indonesia yang menjabat sebanyak dua kali, yakni pada masa kabinet Natsir dan Wilopo. Bahder Djohan mengesahkan kurikulum Rentjana Peladjaran Terurai sebagai lanjutan dari kurikulum sebelumnya, yaitu Rentjana Peladjaran yang ditetapkan oleh Suwandi pada tahun 1947. Kurikulum Rentjana Peladjaran Terurai tetap diberlakukan oleh Yamin sebagai Menteri PP dan K pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo. Penerapan kurikulum tersebut memberikan dampak yang positif bagi awal pendidikan bangsa Indonesia. Guru berperan besar dalam distribusi ilmu pengetahuan melalui sekolah-sekolah yang diikuti oleh masyarakat. Lebih lanjut, Datumula (2020) menyebutkan bahwa pada masa itu, satu mata pelajaran diampu oleh satu guru, tetapi dalam hal pelaksanaan pembelajarannya masih tersentral pada guru.

Yamin sebagai Menteri PP dan K memang tidak mengubah pemberlakuan kurikulum pendidikan sebelumnya, tetapi melakukan penyesuaian dan pengembangan atas kurikulum yang telah berlaku. Selang beberapa waktu menjabat, Yamin menemukan adanya masalah pemberlakuan konstitusi pasca dibubarkannya RIS dan kembali menjadi NKRI. Koordinasi antar wilayah yang sebelumnya menjadi negara bagian masih sulit sehingga mengakibatkan munculnya *delay* dalam penerapan kebijakan pendidikan di seluruh Indonesia. Merespons hal tersebut, Yamin menetapkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 yang berisi tentang pernyataan diberlakukannya UUPP di seluruh wilayah Indonesia (Prabowo, 2016). Seperti yang disebutkan oleh Suwignyo (2021) bahwa ketika menjabat, Yamin dan M. Hutasoit berupaya untuk memperluas jangkauan pendidikan Indonesia pada awal kemerdekaan dengan tujuan *fullfilling the independence* (mengisi kemerdekaan) dan meningkatkan populasi pelajar. Mengingat pada masa perang revolusi kemerdekaan (1945-1949) banyak pelajar yang meninggalkan bangku sekolahnya untuk ikut serta dalam kemiliteran untuk melawan Belanda sehingga melewatkan beberapa tahun pendidikan mereka (Keppy, 2024).

Pada masa kabinet Ali, yang berperan dalam membentuk dan memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat Indonesia tidak hanya berasal dari pihak pemerintah, melainkan juga dari organisasi-organisasi masyarakat. Salah satu poin yang terkandung dalam UUPP berkaitan dengan sekolah-sekolah yang telah berdiri sebelum diberlakukannya UUPP, termasuk sekolah partikelir atau swasta (Hidayat, 2018). Masyarakat diberi kesempatan dalam ikut menyelenggarakan pendidikan melalui sekolah-sekolah partikelir berdasarkan agama atau pandangan hidup tertentu. Sekolah-sekolah partikelir yang masuk dalam persyaratan pemerintah dapat diberi bantuan subsidi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi bangsa Indonesia (Hidayat, 2018).

Adapun muatan utama yang harus diadakan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri maupun partikelir harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang dilaksanakan mengikutsertakan proses kontekstualisasi pengetahuan dengan kehidupan bersama relevansi nasionalisme dan persatuan yang bersumber dari Pancasila. Upaya dekolonisasi tersebut bersumber dari rumusan yang disusun oleh Panitia Penyelidik Pengadjaran yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1946 untuk mereduksi pengaruh pengetahuan Barat yang dikemas dalam pendidikan kolonial. Azhar (2021) menyebutkan bahwa dekolonisasi perlu dilakukan karena adanya penetrasi gagasan kolonial yang meresap masuk di berbagai bidang kehidupan melalui gerbang intelektualitas.

Sementara itu, kontribusi tambahan dalam bidang pendidikan pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo juga dilakukan oleh Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis). Gerwis mengadakan kongres pertama pada 1951 dan konferensi kerja di Semarang pada tahun 1952. Afifi dan Kristianwantoni (2019) menyebutkan bahwa pertemuan-pertemuan tersebut membahas tentang kedamaian dan hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap anak dan wanita. Kemudian, disebutkan dalam surat kabar *De Waarheid* Jilid 13 Nomor 1532 terbitan 12 Mei 1954 bahwa kongres kedua Gerwis dilakukan pada tahun 1954 dan menghasilkan perubahan nama organisasi dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar (Gerwis) menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) dan menghasilkan putusan posisi ideologi Gerwani yang menyatakan bahwa Gerwani juga bergerak dalam ranah pendidikan untuk mengentaskan buta huruf di masyarakat.

Realisasi putusan Gerwani diwujudkan dalam bentuk nyata penyelenggaraan pendidikan di daerah pedesaan. Seperti yang dikabarkan dalam *De Waarheid* jilid 12 nomor 1405 yang terbit pada 9 Desember 1955. Di Malang tahun 1954, Gerwani menyelenggarakan kursus membaca dan menulis di 120 desa yang diikuti oleh setidaknya 1349 orang untuk mengatasi buta huruf di daerah-daerah pelosok. Gerwani juga berkontribusi dalam hal pendidikan bagi anak-anak. Dikutip dari sumber yang sama, disebutkan bahwa Gerwis membuka taman kanak-kanak di 15 tempat yang diikuti oleh hampir 600 anak. Anak-anak yang masuk dalam taman kanak-kanak yang diselenggarakan oleh Gerwis memperoleh pendidikan awal, seperti kemampuan membaca, menulis, dan menghitung (*calistung*). Selain pengajaran *calistung* yang ditujukan untuk anak-anak, Gerwis juga mentransfer wacana tentang pentingnya ketahanan pangan dan pemahaman sosio-politik kepada masyarakat (Wuschitz & Reza, 2021). Terkhusus pada kaum perempuan, Gerwani memberikan pemahaman tentang emansipasi perempuan dan hak-hak perempuan yang harus diketahui dan diperjuangkan.

Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kabinet Ali dan dukungan oleh organisasi yang peduli dengan pendidikan masyarakat, seperti Gerwis memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Persentase buta huruf di masyarakat perlahan mulai berkurang yang mana hal ini dapat dikatakan menjadi langkah awal distribusi pengetahuan melalui tulisan. Ricklefs (2007) menyebutkan bahwa meningkatnya jumlah masyarakat yang melek huruf ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi surat kabar harian yang pada tahun 1950 masih kurang dari 500.000 eksemplar menjadi lebih dari 933.000 eksemplar pada tahun 1956. Secara perlahan, upaya-upaya penyelenggaraan pendidikan berdampak pada masyarakat banyak dan upaya dekolonisasi yang dilakukan perlahan melepas kekangan pengetahuan yang sebelumnya dilakukan oleh Belanda.

Lambat laun, masyarakat menginginkan adanya fasilitas untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi sehingga diperlukan penambahan jumlah universitas. Pemerintahan Ali Sastroamidjojo berupaya menetapkan kebijakan pendidikan tentang pembentukan perguruan tinggi atau universitas di luar daerah Jakarta dan Yogyakarta serta memperluas pengembangan ilmu pengetahuan melalui memperbanyak ragam fakultas. Hal ini dipertegas dengan adanya Uraian Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan dalam rapat dengan Universitas Indonesia di Jakarta tanggal 10 September 1954 dan dengan Universitas Negeri Gadjah Mada di Yogyakarta tanggal 18 September 1954 tentang maksud pemerintah

untuk mendirikan Universitas Airlangga di Jawa Timur (Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954).

Pembentukan bangsa Indonesia pascakemerdekaan membutuhkan guru-guru yang memiliki kemampuan akademis dan pedagogik yang lebih baik serta memiliki semangat kebangsaan Indonesia. Sekolah Guru telah diadakan sejak pra kemerdekaan dengan struktur tingkatan yang dapat diikuti langsung oleh lulusan *Sekolah Rakjat*. Namun, seiring dengan berjalannya waktu diperlukan pendidikan tinggi guna meningkatkan mutu pendidikan Indonesia supaya dapat bersaing dalam kancah internasional. Berangkat dari hal tersebut, Yamin mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang dapat melahirkan guru-guru yang bermutu dan bertaraf pendidikan tinggi melalui Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Peraturan mengenai PTPG disahkan oleh Yamin melalui Putusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 38742/Kab. tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru pada 1 September 1954.

Pendirian PTPG ditujukan sebagai perguruan tinggi untuk guru sekolah menengah (*Indische Courant* Jilid 8 Nomor 3, 9 Juli 1955). PTPG segera dibuka di banyak daerah sejak tahun 1954. Pembukaan PTPG diawali di daerah Jakarta dan Yogyakarta, lalu dilanjutkan di Bandung, Malang, dan Batusangkar. Pada tahun 1955, PTPG Yogyakarta dibuka di bawah Yayasan Sanata Dharma dengan empat program studi, antara lain matematika dan ilmu pengetahuan alam, bahasa Inggris, sejarah, dan pedagogi. Di tahun yang sama, Yamin mengikuti serah terima kunci gedung baru yang diterima rektor Universitas Airlangga Prof. A.K Pringgodigdo dari Kepala Dinas Bangunan setempat Soemedi yang difungsikan sebagai PTPG fakultas pedagogi (*Indische Courant* Jilid 8 Nomor 3, 9 Juli 1955).

Surat kabar *Het Nieuwsblad voor Sumatra* jilid 8 Nomor 1951 yang terbit pada 24 Februari 1955 menyebutkan bahwa pada 20 Oktober 1954, seluas 7,5 hektar kawasan Villa Isola di Bandung dibeli pemerintah senilai Rp1.500.000 dan namanya diubah menjadi kawasan Bumi Siliwangi. Kawasan Bumi Siliwangi dijadikan sebagai lokasi PTPG Bandung yang diresmikan oleh Yamin beserta para guru besar dan dosen pada 19 Februari 1955. Pada agenda peresmian tersebut, Yamin juga membentuk dewan kurator yang diketuai oleh Rd. Sanusi Hardjadinata. Dibentuknya dewan kurator disebabkan pada saat peresmian pembukaan PTPG Bandung kawasan Bumi Siliwangi berbentuk reruntuhan sehingga perlu dilakukan pembangunan ulang fasilitas pendidikan yang baru.

Akhir masa pemerintahan kabinet Ali dapat dikatakan lebih memuaskan dibandingkan kabinet-kabinet sebelumnya. Walaupun berhadapan dengan persoalan problematik di parlemen hingga muncul mosi tidak percaya dan beberapa partai pendukungnya menarik diri, Ali Sastroamidjojo berhasil meningkatkan kualitas produksi di beberapa sektor. Salah satu peningkatan yang diperoleh pada masa kabinet Ali adalah produksi pangan dalam negeri sehingga jumlah impor pangan pada tahun 1953-1955 berkurang (*Indische Courant*, Jilid 8 Nomor 21, 21 September 1955). Selain peningkatan dalam bidang pangan, kabinet Ali juga berhasil meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia yang direpresentasikan dari hasil realisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran.

Realisasi UU Nomor 4 tahun 1950 pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo dapat dikatakan gencar dilaksanakan. Walaupun Yamin sebagai Menteri PP dan K tidak membuat kurikulum pendidikan baru dan lebih memilih mengikuti dan

mengembangkan kurikulum *Rentjana Peladjaran Terurai*, realisasi dan pengembangan kurikulum tersebut telah diupayakan secara maksimal. Banyak lembaga pendidikan berupa sekolah dan madrasah yang dibuka untuk masyarakat dengan dibantu oleh pemerintah. Pembukaan universitas atau perguruan tinggi yang dibuka dan diresmikan oleh Yamin sebagai Menteri PP dan K juga dilakukan pada masa kabinet Ali. Setidaknya beberapa disiplin ilmu dapat dipelajari oleh para mahasiswa di perguruan tinggi, seperti kedokteran, sastra, hukum, teknik, dan sains. Tak luput ilmu pedagogi juga difasilitasi pemerintah dalam Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang akan menghasilkan lulusan-lulusan pendidik generasi penerus bangsa.

Kesimpulan

Penelitian ini membuahkan sejumlah informasi bahwa pemerintah Indonesia pada masa Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) berupaya melanjutkan usaha dekolonisasi pendidikan dengan menyusun Undang-Undang Pokok Pendidikan (UUPP) dan mengesahkannya menjadi UU Nomor 4 tahun 1950. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti oleh Mohamad Yamin sebagai Menteri PP dan K pada masa pemerintahan Ali Sastroamidjojo I tahun 1954. Yamin dengan menetapkan UU Nomor 12 tahun 1954 dengan tujuan supaya UUPP yang telah disahkan dapat diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Realisasi dekolonisasi pendidikan yang tersusun dalam kebijakan pendidikan pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I diperluas dengan upaya ekstensifikasi pendidikan berupa peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendidikan di banyak wilayah. Selain itu, sikap pemerintah yang terbuka dengan keinginan dari pihak partikelir untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan membuat mutu pendidikan masyarakat Indonesia perlahan menjadi lebih baik dan menjangkau banyak wilayah.

Referensi

- Afifi, R. I., & Kristianwantoni, S. (2019). Gerwani dalam Pergulatan Ideologi Komunis 1950-1965. *Santhet*, 3(1), 10–20. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/690>.
- Alatas, S. F. (2024). The Coloniality of Knowledge and The Autonomous Knowledge Tradition. *Sociology Compass*, 18(8). <https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soc4.13256>.
- Alatas, S. F., Suzuki, T., & Nishio, Z. Voyage to Autonomous Knowledge, with Farid Alatas. *Newsletter: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University No. 80*, 29. <https://newsletter.cseas.kyoto-u.ac.jp/en/collected-back-issues/2022-en-nl80-interview-alatas/>.
- Anwar, S. (2017). Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada Periode Revolusi dan Liberal (1945-1959). *el-HiKMAH*, 11(2), 97–110. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v11i2.55>.
- Azhar, M. H. M. (2021). Discourse on The Decolonization of Knowledge and The Formation of Local Wisdom through Philosophy Courses and Current Issues. *RIS*, 8(1), 65–83. <https://doi.org/10.22452/ris.vol8no1.3>.
- Carey, P., & Noor, F. A. (2022). *Ras, Kuasa, dan Kekerasan Kolonial di Hindia Belanda 1808-1830*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

- Datumula, S. (2020). Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja. *MODERASI*, 1(2), 56–78. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.27>.
- Ewing, C. (2019). The Colombo Powers: crafting diplomacy in the Third World and launching Afro-Asia at Bandung. *Cold War History*, 19(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/14682745.2018.1500553>.
- Fakih, F. (2017). Strategies of Rent Seeking during The Sukarno Period: Foreigners and Corruption, 1950–1965. *Lembaran Sejarah*, 13(1), 91. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33523>.
- Freire, P. (2008). *Pendidikan Kaum Tertindas*. LP3ES.
- Hidayat, A. (2018). Dinamika Pembentukan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran Pertama dan Penerapannya di Indonesia (1950-1954). In *Prosiding Seminar Dosen Hasil Penelitian dan Abdimas Genap UNINDRA* (pp. 12–30). <https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/dispangenap2018/article/viewFile/181/113>
- Karim, R. (1983). *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*. Rajawali Press.
- Keppy, P. (2024). The making and taming of the veteran in 1950s Indonesia. *War & Society*, 43(4), 364–381. <https://doi.org/10.1080/07292473.2024.2375881>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Madinier, R. (2017). Confronting Reality: In *Islam and Politics in Indonesia* (pp. 119–201). NUS Press Pte Ltd. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1ntfxk.10>
- Nailufar, U. E. (2015). Kontribusi Pemikiran Mr. Muhammad Yamin terhadap Perkembangan Pendidikan Karakter Pemuda di Indonesia (Skripsi). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Noer. (1991). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*. LP3ES.
- Poesponegoro. (2011). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Balai Pustaka.
- Prabowo, G. (2016). *Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) Nomor 4 Tahun 1950 Bagi Pendidikan di Indonesia 1946-1954*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prayogo, A. B. (2024). Perkembangan PGRI Mulai dari Masa Kolonial hingga Masa Sekarang. *JUSAN*, 2(1), 67–76. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/jusan/article/view/9514>.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004*. Serambi.
- Rizaldi, M., Fiizha, B. F., Evendi, E. Y., Mufti, M. 'Afwan, & Febriani, S. W. (2023). Dampak Keluarnya NU dari Masyumi Terhadap Politik Indonesia, 1952-1960. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 9(2), 123–133. <https://doi.org/10.29408/jhm.v9i2.7636>.

- Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. *Historia*, 6(2), 365–378. <http://dx.doi.org/10.24127/hj.v6i2.1250>.
- Silitonga, S. G. J. (2021). Indonesia 1945-2020: Demokrasi dan Civil Society. *SOSAINS*, 1(7), 662–668. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i7.151>.
- Suradi, M. S. (1986). *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Suwignyo, A. (2021). A Vast Expansion, Yet a Sorry Infrastructure: A Paradox of the Decolonization of Indonesian Education, c. 1950s. *Lembaran Sejarah*, 17(1), 48. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.69968>.
- Syafaruddin, A., & MesioNomor (2012). *Inovasi Pendidikan: Suatu Analisis terhadap Kebijakan Baru Pendidikan*. Perdana Publishing.
- Utami, I. W. P., Sapto, A., Leksana, G. T., & Ayundasari, L. (2024). Decolonizing Indonesian History Curriculum, 1946-1964. *Paramita: Historical Studies Journal*, 34(1), 110–127. <https://doi.org/10.15294/paramita.v34i1.43482>.
- Wardaya, B. T. (2008). *Indonesia Melawan Amerika: Konflik Perang Dingin 1953-1963*. Galangpress.
- Wuschitz, S., & Reza, A. (2021, September). Coded Feminisms in Indonesia. In *Proceedings of Politics of the Machines-Rogue Research 2021* (pp. 235-246). BCS Learning & Development.